RINGKASAN BERITA HARI INI

Fraksi PKS Menyoroti Strategi Pemkab Tekan Piutang Daerah



PANDANGAN UMUM: Suasana rapat paripurna di ged raperda pertanggungjawaban APBD 2023.

jian dan pembahasan intensif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabu-paten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah (APBD) Ta-hun 2023, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangan umum mengenai kondisi keuangan daerah, khususnya terkait piutang.

Dalam penjelasannya, juru bicara Fraksi PKS Anang Ma'ruf mencatat bahwa saldo piutang pendapatan netto tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 311 miliar. Penurunan sebesar

Ke Halaman 10

Diduga Tercemar Limbah, Air Sungai di Desa Pabean Berwarna Hijau

Plt Bupati Ajak Kepala Sekolah Bangun Sekolah Mandiri

SIDOARJO - Kemandirian sekolah sangat dibutuhkan di Ka-pupaten Sidoarjo. Mandiri dalam

keuangan, mampu mengelola sumber daya pendidik, kurikulum hingga proses belajar mengajar. Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M. Kn berkomitmen untuk menciptakan sekolah mandiri. Dia mengajak para kepala sekolah memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan pendidi-kan yang lebih optimal. "Kepala sekolah dan guru

"Kepala sekolah dan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kami berharap kepala sekolah dapat melakukan manajemen sekolahnya dengan sangat baik" kata PIt Bupati Subandi, saat acara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) KKKS-KKG se Kec. Sukodono di Gedung PGRI Sidoario.

Untuk menciptakan sekolah mandiri, stabilitas pereko guru juga harus dijaga. Plt Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan bakal memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Bisa untuk jaminan keselamatan saat bekerja dan juga tabungan setelah tidak lagi

ngajar. "Pemk mkab Sidoario akan hadir membantu melalui BPIS ketena gakerjaan. BPJS ketenagakerjaan ini akan menjadi garansi atau jaminan bagi para guru yang sudah berjasa dalam mendidik calon penerus bangsa" ucap Suabndi dihadapan 242 Guru Wali Kelas SD se Kec. Sukodono.

Sementara Pengawas Sekolah Dasar Korwil Sukodono, Sumiyatin mengungkapkan kegia-tan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini sangat

tan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini sangat penting bagi guru.
Ada 25 kepala sekolah dan ratusan guru yang ikut dalam PKB. Melalui program ini, diharapkan para pendidik atau guru bisa memahami dan memetakara sikap belajar anak didiknya.
"Kolaborasi antar pendidik dan Aksi Nyata atau praktik dalam proses belajar mengajar menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan acara ini" ucap Sumiyatin Rabu(12/6/24)
Kedepan, Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan dukungan terus memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan yang sejalan dengan kurikulum merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Tujuannya agar pendidikan di Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas yang lebih baik lagi, siwa-siswi jura memiliki ke-

di Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas yang lebih baik lagi, siswa-siswi juga memiliki kemampuan dan prestasi yang dapat mengharumkan nama Sidoarjo. • Loe



Apresiasi Pelatihan Pelayanan Kesehatan Tradisional





Pit Bupati Subandi, saat acara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) KKKS-KKG se Kec. Sukodono di Gedung PGRI Sidoarjo

Baru Diperbaiki setelah Tujuh Bulan Terbakar

Siswa SDN Jenggot Dibagi Jadi Dua Sif

SIDOARJO - Sejak 16 No-vember tahun lalu, tiga kelas, satu ruang guru, dan toilet di SDN Jenggot, Kecamatan Krembung, tak bisa digunakan karena terbakar. Setelah nyaris tujuh bulan, sekolah tersebut

katanyakemarin (12/6). jar sistem sif tersebut i berlangsung hampir bulan. Dia mengaku elajaran sistem sif kurang fi Namun, itu terpaksa ukan karena tidak ada



angan lagi. Dia mengatakan, memetakan kebutuhan per-eskipun kebakarannya baikan. "Infonya bulan ini

baikan. "Infonya bulan ini mulai diperbaiki. Harapan kami bisa secepatnya karena sudah lama," katanya. Kepala Bidang Pengenda-lian, Pengawasan, Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Sidoarjo Indar Hidayanti mengatakan, perbaikan SDN

penunjukan penyedia ba-rang/jasa (SPPBI). "Perki-ran kontrak pekerjaan di minggu ke-3 Juni dan peke-rjaan sudah mulai bisa di-laksanakan," katanya. Dia menyatakan, fokus per-balkanna banya pada nange-

Pagar Hanya Susunan Batako, **Mobil Nyaris Terperosok**

SIDOARJO – Bulan lalu, jembatan di pertigaan Jalan Suko-Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Sidodadi dil Desa Suko dikeluhkan warga karena tak punya pagar pembatas. Aki-batnya, banyak kendaraan yang tempenyak ke saluran air.

batnya, banyakkendaraan yang terpersosk ke saluran ali: Dinas terkait lantas mema-sang pagar sementara berupa batako yang disusun begitu saja. Tentu saja pagar tak kuat. Kemarin (12/6) sebuah mobil nyaris terpersosk ketika hen-dak berbelok. Sasan, salah seorang warga

Gak berbeiok.
Sasono, salah seorang warga
Candi, menuturkan, belokan
tersebut sempit. Lebarnya
hanya sekitar 5 meter. Karena
itu, sebelum pagar sementara

tak terlalu kelihatan. Kemarin pagar tersebut rusak karena dihantam mobil yang akan belok kiri. "Bagian yang mepet dengan jalan ambrol, terkena mobil yang akan belok. Un-

dipasang, banyak pengendara dari Desa Durungbedug Kecamatan Candi, yang akan belok kiri ke arah Suko tereperosok, "Jalannya sempit dan tidak kelihatan pinggir sungainya karena tidak ada pagar, katanya. Keluhan warga itu direaksi dinas terkait. Pagar sisi barat jembatan dibangun. Namu, hanya pagar sementara dari susunan batako. Posisinga lebih aranan, hanya pagar sementara dari susunan batako. Posisinga sangat rendah sehingga tak terlalu kelihatan. Kemarin pagar tersebut rusak karenaria radibangun dulu sehingga dalakan pagar dibangun dulu sehingga tersebut sedang diagendakan. Sebagai antisipasi agar tidak ada kendaraan yang terperosok, pagar jembatan sementara dibangun dulu sehingga hanya berupa susunan batako sederhana. Dajam waktu dekat, pagar yang layak segera dibangun. (uzi/c7/any)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Fraksi PKS Menyoroti Strategi Pemkab Tekan Piutang Daerah



PANDANGAN UMUM: Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo membahas raperda pertanggungjawaban APBD 2023.

SIDOARJO-Setelah melakukan kajian dan pembahasan intensif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangan umum mengenai kondisi keuangan daerah, khususnya terkait piutang.

Dalam penjelasannya, juru bicara Fraksi PKS Anang Ma'ruf mencatat bahwa saldo piutang pendapatan netto tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 311 miliar. Penurunan sebesar

Ke Halaman 10



Fraksi PKS Menyoroti...

lebih dari Rp 11 miliar itu menunjukkan adanya upaya pengelolaan piutang yang lebih baik.

Namun demikian, Fraksi PKS menggarisbawahi bahwa piutang terbesar tetap berasal dari pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Selain itu, piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga mencatatkan peningkatan, begitu pula piutang retribusi lainnya.

Anang melihat besarnya jumlah piutang daerah ini sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangani piutang tersebut secara efektif.

Menurut dia, piutang daerah yang besar ini sebenarnya merupakan sumber daya finansial yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Sidoarjo. "Maka dari itu, kami meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai langkah strategis apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi piutang daerah ini secara signifikan," ujar Anang.

Pihaknya mengharapkan adanya tindakan konkret dan strategi yang jelas dari pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan piutang dapat mendukung optimalisasi anggaran dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Mereka juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan dan akuntabel di masa yang akan datang. (nis/vga)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Jelang Turun Rekom, DPP PKB Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan









PKB untuk Bakal Calon Bupati (bacabup) dan Wakil Bupati (bacawabup) Sidoarjo masih belum turun hingga saat ini. Nah, untuk menentukan

rekom tersebut, DPP PKB bakal menggelar Uji Kela-yakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon kepala daerah (bacakada) Sido-arjo. UKK tersebut akan

Juni 2024 di kantor DPP
PKB Jakarta Pusat.

Ketua Desk Pilkada
DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan,
bacakada yang masih terdaftar secara online melalui link sicakada.pkb.id sebanyak 6 orang. Yaitu, Subandi, Usman, Achmad Amir Aslichin (Iin),

• Ke Halaman 10

RADAR

Jelang Turun Rekom,...

Fandi Utomo, Sugiono Adi Salam, dan Muhammad Shofi. Semuanya diundang oleh DPP PKB untuk mengikuti UKK.

"Pelaksanaan UKK ini adalah proses tahapan DPP PKB mengeluarkan rekomendasi kepada bacakada kalau selama ini beredar kabar bahwa rekom sudah turun kepada bacakada itu info tidak benar," tegas Nasih.

Nasih menjelaskan, semua Bacabup potensial mendapatkan surat tugas dari DPP PKB.

"Insyaallah semua Calon Bupati potensial dapat surat tugas, dan İnsyaallah hari Jumat besok diundang DPP PKB mengikuti tahapan UKK, jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB

Sidoarjo Subandi mengatakan, surat tugas atau rekom merupakan kewenangan dari DPP PKB. Subandi yang juga akan mencalonkan diri sebagai Bacabup Sidoarjo mengaku terus berkomunikasi dengan pimpinan pusat partai. Kendati demikian, soal keputusan ia serahkan

sepenuhnya ke DPP PKB. "Sebagai ketua partai ya tetap komunikasi dan itu juga kan sebagai kepentingan pemerintah daerah, apalagi PKB Sidoarjo sendiri kan mempunyai 16 kursi, tentu keputusan

ada di DPP PKB," ujarnya. Menurutnya, DPC PKB Sidoarjo mempunyai banyak kader potensial yang akan maju. Karena itu ia merasa tidak ada persoalan terkait siapa saja nanti yang maju dan ditujuk oleh DPP PKB. "Kita sebagai petugas partai ya boleh-boleh saja, ada Pak Usman (Ketua DPRD Sidoarjo, red), Mas Iin dan lainnya, cuma nanti siapa yang direkom ya kembali lagi ke DPP PKB, terangnya.

Bilamana surat rekom jatuh pada calon yang lain dan bukan dirinya, Subandi mengaku siap terjun untuk kemenangan.

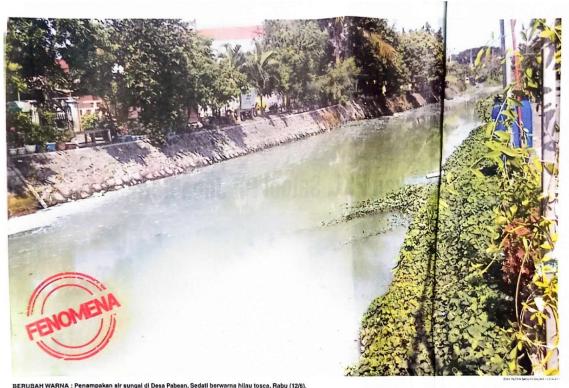
"Tentunya seperti itu, namanya juga petugas partai, cuma tidak boleh nanti siapa yang mendapatkan rekom, kita akan usung, apakah itu Mas Iin atau Pak Usman, intinya kita memberikan support dan dukungan lah," katanya.

Pihaknya terus berkomunikasi dengan partai lain, seperti Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS dan PPP. Hal tersebut menjadi usaha dirinya untuk mendapatkan rekom dari DPP PKB. "Iya, Insyaallah namanya juga usaha," imbuhnya. (sai/vga)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



Diduga Tercemar Limbah, Air Sungai di Desa Pabean Berwarna Hijau

Sungai di Desa Pabean, Kecamatan Sedati berubah warna. Sungai itu tiba-tiba berwarna hijau tosca, dan berbusa. Peristiwa ini viral di media sosial, Rabu, (12/6) pagi.

Diky Putra Sansiri,

INFORMASI yang dihimpun Radar Sidoarjo di lokasi, terlihat warna air sungai kenyataannya memang berubah menjadi hijau tosca. Bahkan, busa mengalir di bagian timur sisi sungai. Namun, tidak tercium bau menyengat. Salah satu warga Desa Pabean Yoyok mengatakan, air sungai berubah

Salah satu warga Desa Pabean Yo yok mengatakan, air sungai berubak warna menjadi hijau cerah sejak pagpukul 07.00. Namun, dia tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan warna air sungai tersebut berubah

Tetapi, warga meyakini bahwa penyebabnya karena limbah kimia. Warna sungai yang berubah ini ternyata pukan sekali setahun yang lalu

Ke Halaman 10



Diduga Tercemar Limbah,...

pernah ada kejadian serupa, bahkan hingga bau menyengat.

"Tidak tahu ini limbah apa. Warnanya hijau sampai berbusa. Biasanya (sungai, red) warna cokelat," ujar pria berusia 35 tahun itu.

Namun, warga tidak mengetahui limbah tersebut asalnya darimana. Dugaan sementara berasal dari sebuah pabrik.

Hal senada diungkapkan warga



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Harga Beras Naik, Pasrah Dikomplain Pelanggan

CANDI-Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga beras di Sidoarjo mengalami kenaikan. Salah satunya di agen beras Pasar Larangan, Kecamatan Candi, Meski kenaikan harga beras tidak terlalu signifikan, diprediksi akan terus melambung hingga Lebaran kurban.

Harga beras medium saat narga beras medium saat ini berkisar antara Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogramnya. Sedangkan harga beras premium kini berada di kisaran harga Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu per



kilogramnya.
Salah salu agen beras,
Rifai mengatakan, dirinya
mengikuti Harga Eceran
Tertinggi (HET) sebagaimana yang telah diumumkan pemerintah. Baik beras me-dium maupun premium semuanya naik sebesar Rp 500 per kilogramnya. "Sudah naik Rp 400 hingga

Rp 800 per kilogramnya, pre mium maupun medium sama tertinggi hanya Rp 800 saja. ucapnya saat ditemui di

kasi, Rabu (12/6). Dia meyakini, kenaikan

terus naik, Menyusul hari raya Idul Adha yang semakin raya idul Adha yang semakin dekat. "Bakal naik terus kan mengikuti, apalagi panen juga habis," katanya. Rifai mengaku pasrah akan banyaknya komplain

dari pelanggan. Karena itu ia ingin harga beras tidak terus naik.

Meski begitu, ia memasti-kan stok beras di Sidoarjo aman. Sehingga tidak perlu khawatir stok beras habis. "Stok beras, Alhamdulillah aman," pungkasnya. (sai/vga)





agi-Lagi Tertibkan PKL, Satpol PP Juga Berikan Edukas*i*.

SIDOARJO-Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan komit-men mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib melalui rutinitas Patroli Cipta Kondisi. Patroli ini bertujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2013 yang mengatur tentang ketertiban jalan, jalur hijau, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya.

Dalam Perda tersebut, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat guna menjaga ketertiban dan keindahan kota. Namun, hingga kini, masih banyak warga yang belum memahami sepe-nuhnya isi dari Perda tersebut.

Buktinya, di beberapa lokasi masih terdapat warga yang melanggar. Seperti PKL yang berjualan di bahu jalan atau trotoar. Padahal sudah beberapa kali ditertibkan.

"Patroli Cipta Kondisi bukan hanya sekadar pengawasan, tetapi juga upa-ya kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," ujar Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan.

Pihaknya selalu memberikan imbauan kepada masyarakat, terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) ang seringkali melanggar aturan Perda nomor 10 tahun 2013.



DIEDUKASI: Salah satu PKL yang berjualan di tr

setiap patroli, Satpol PP tak hanya bertindak tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Edukasi ini penting agar

memahami bahwa ketertiban ialan dan fasilitas umum adalah tanggung jawab bersama untuk kenyamanan dan keindahan kota. Satpol PP berharap, melalui patroli

rutin dan edukasi yang dilakukan,

masyarakat akan semakin sadar akan masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan sekitar. De-ngan demikian, Sidoarjo dapat menjadi kota yang lebih aman, tertib, dan nyaman untuk ditinggali. (nis/vga)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Baru Diperbaiki setelah Tujuh Bulan Terbakar

Siswa SDN Jenggot Dibagi Jadi Dua Sif

SIDOARJO - Sejak 16 November tahun lalu, tiga kelas, satu ruang guru, dan toilet di SDN Jenggot, Kecamatan Krembung, takbisa digunakan karena terbakar. Setelah nyaris tujuh bulan, sekolah tersebut baru akan diperbaiki.

Kemarin (12/6) puing-puing bekas kayu dan bangunan terbakar masih tampak berserakan di area kelas yang terbakar. Belum ada perbaikan. Karena peristiwa kebakaran tersebut, sejak November pula para siswa belajar dengan sistem sif.

Kepala SDN Jenggot Maftuchanis Chariro mengatakan, sejak 16 November sampai saatini sekolah mengatur jadwal pembelajaran dengan dua sif. Siswa kelas I, II, dan III masuk pagi. Setelah mereka pulangganti siswa kelas IV, V, dan VI yangmasuk. 'Sampai sekarang masih sif karena tiga kelas dan saturuangguru tidak bisa digunakan,' katanya kemarin (12/6).

Belajar sistem sif tersebut sudah berlangsung hampir tujuh bulan. Dia mengaku pembelajaran sistem sif kurang efektif. Namun, itu terpaksa dilakukan karena tidak ada



SEGERA DIBANGUN: Kepala Sekolah SDN Jenggot Maftuchanis melihat kondisi ruang sekolahnya yang terbakar pada November tahun lalu.
Rencananya perbaikan dilakukan dalam bulan ini. Selama kelas rusak, siswa masuk dalam dua gelombang.

ruangan lagi. Dia mengatakan, meskipun kebakarannya sudah cukup lama, sampai saat ini belum ada perbaikan. Sebab, butuh proses identifikasi dan lainnya.

"Saat kebakaran sudah ditinjau, setelahnya juga ada peninjauan. Termasuk Pak Plt Bupati sudah meninjau langsung," katanya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan perbaikan. "Infonya bulan ini mulai diperbaiki. Harapan kami bisa secepatnya karena sudah lama," katanya.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Sidoarjo Indar Hidayanti mengatakan, perbaikan SDN Jenggot yang terbakar saat ini sudah masuk tahap surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ). "Perkiraan kontrak pekerjaan di minggu ke-3 Juni dan pekerjaan sudah mulai bisa dilaksanakan," katanya.

Dia menyatakan, fokus perbaikannya hanya pada ruang yang terbakar. "Perbaikannya untuk bangunan gedung yang terbakar saja, yaitu empat ruang kelas dan toilet," katanya, Kursi dan sarana-prasarana lainnya di kelas yang terbakar juga akan segera dilengkapi. "Untuk sarana meja kursi, kami kootdinasikan dengan pihak sekolah terkait perincian kebutuhannya dan akan diusulkan penganggarannya di tahun ini sesuai ketersediaan anggaran," jelasnya, Hingga kini pihaknya masih menghitung kebutuhannya, (uzi/c6/any

Jawa Pos



HANCUR:
Pagar
sementara
jembatan
Raya
Suko-Lebo
kembali
ambrol
ditabrak
mobil
kemarin.

Pagar Hanya Susunan Batako, Mobil Nyaris Terperosok

SIDOARJO – Bulan lalu, jembatan di pertigaan Jalan Suko-Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Sidodadi di Desa Suko dikeluhkan warga karena tak punya pagar pembatas. Akibatnya, banyak kendaraan yang terperosok ke saluran air.

Dinas terkait lantas memasang pagar sementara berupa batako yang disusun begitu saja. Tentu saja pagar tak kuat. Kemarin (12/6) sebuah mobil nyaris terperosok ketika hendak berbelok.

Sasono, salah seorang warga Candi, menuturkan, belokan tersebut sempit. Lebarnya hanya sekitar 5 meter. Karena itu, sebelum pagar sementara dipasang, banyak pengendara dari Desa Durungbedug, Kecamatan Candi, yang akan belok kiri ke arah Suko terperosok. "Jalannya sempit dan tidak kelihatan pinggir sungainya karena tidak ada pagar," katanya.

Keluhan warga itu direaksi dinas terkait. Pagar sisi barat jembatan dibangun. Namun, hanya pagar sementara dari susunan batako. Posisinya juga sangat rendah sehingga tak terlalu kelihatan. Kemarin pagar tersebut rusak karena dihantam mobil yang akan belok kiri. "Bagian yang mepet dengan jalan ambrol, terkena mobil yang akan belok. Un-

tung, mobilnya tidak sampai terperosok," jelasnya. Harapannya, segera dibangun pagar jembatan yang layak sehingga lebih aman.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, pembangunan pagar jembatan di pertigaan tersebut sedang diagendakan. Sebagai antisipasi agar tidak ada kendaraan yang terperosok, pagar jembatan sementara dibangun dulu sehingga hanya berupa susunan batako sederhana. Dalam waktu dekat, pagar yang layak segera dibangun. (uzi/c7/any)

CS Dipindai dengan CamScanne

Jawa Pos



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DISHUB



BELAJAR: Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan Dishub Kabupaten Sidoarjo Wahyu Herison memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di SMKN 1 Sidoarjo kemarin.

Ajarkan Disiplin Lalu Lintas ke Pelajar

SIDOARJO - Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar tertinggi nomor 2 di Sidoarjo. Antisipasinya, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo mengajarkan disiplin lalu lintas kepada pelajar di puluhan sekolah.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan Dishub Kabupaten Sidoarjo Wahyu Herison mengatakan, selama 2023 ada 364 kejadian laka lantas yang melibatkan pelajar. Jumlah tersebut urutan kedua paling banyak setelah jumlah laka lantas yang melibatkan karyawan.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo laka lantas yang dialami pelajar," katanya, Karena itu, pihaknya tahun ini berkeliling ke sekolahsekolah untuk memberikan pembelajaran tentang disiplin lalu lintas.

Kemarin (12/6) sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar digelar di SMKN 1 Sidoarjo. "Termasuk memberikan pengertian, pengenalan rambu-rambu, dialog interaktif, sekaligus praktik safety riding dan berkendara dengan aman dan nyaman," katanya. (uzi/c7/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

Tunggu Penetapan Formasi, Seleksi CASN Dibuka Juli

JAKARTA - Jadwal seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dipastikan mundur. Seleksi mungkin baru dibuka pada Juli 2024 dari target semula berlangsung bulan ini.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, perubahan jadwal itu berkaitan dengan baru diserahkannya data kebutuhan formasi CASN oleh kementerian/lembaga. Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih memvalidasi data formasi tersebut agar sesuai antara data kebutuhan ASN dan jumlah yang diusulkan. Apabila proses tersebut rampung, kata dia, penetapan formasi pun dilakukan.

Sebagai informasi, total

persetujuan formasi kebutuhan untuk CASN 2024 sebelumnya diumumkan sebanyak 1.289.824. Jumlah itu terbagi menjadi 427.650 formasi untuk instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Angka itu termasuk talenta digital yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari total formasi tersebut, harus ada surat keputusan

(SK) penetapan formasi kebutuhan resmi hingga akhirnya bisa diumumkan. "Mudah-mudahan. Kita mintanya Juni seharusnya sudah selesai (penetapan formasi, Red) supaya Juli bisa (dibuka tahapan seleksinya, Red)," ungkap Rini di kompleks DPR/ MPR, Senayan, Jakarta, kemarin (12/6). Meski mundur dari target, Rini tetap optimistis seleksi CASN bisa diseleng-

garakan tiga kali tahun ini. Di sisi lain, Plt Kepala BKN

Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan pemetaan dan penilaian potensi maupun kompetensi terhadap 111.714 ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Angka itu diperoleh dari proses pemetaan dan penilaian yang dilakukan sejak 2023. (mia/c7/fal)

Jawa Pos



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



Pelatihan pelayanan kesehatan tradisional oleh Dinkes Sidoarjo

LOFTE/DUTA

Apresiasi Pelatihan Pelayanan Kesehatan Tradisional

SIDOARJO - Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu di antara 25 upaya kesehatan di Indonesia. Di Sidoarjo pun, Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan sistem pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pelatihan Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kusuma Agro Resort dan Convention Hall Kota Batu. Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa (11/6/24) dengan tema Asuhan Mandiri Pemanfatan Toga dan Akupresur Kabupaten Sidoarjo Th. 2024.

Plt Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Sidoarjo dr. Sriatun Subandi menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan solutif bagi kesehatan masyarakat itu. Peserta pelatihan dibimbing agar mampu melakukan perawatan kesehatan secara mandiri (asuhan mandiri).

Mereka bisa memanfaatkan taman obat keluarga (Toga). Juga memiliki keterampilan memelihara dan meningkatkan status kesehatan. Serta, mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringain. Semua bisa dilakukan secara mandiri.

"Untuk mengembangkan kemampuan masyarakat melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional, pembinaan seperti Selasa kemarin perlu dilakukan berkesinambungan," jelas dr Sriatun Rabu(12/6/24)

Menurut istri Plt Bupati Sidoarjo H Subandi itu, anggota kelompok keluarga binaan akan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan Toga serta akupresur. Mereka akan semakin terampil jika mengikuti pembinaan berkelanjutan.

Kiprah Pemkab Sidoarjo itu berbuah prestasi. Pembinaan program pelayanan kesehatan tradisional dengan pemanfaatan taman obat keluarga (Toga) dan akupresur ini telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Sidoarjo memperoleh penghargaan terbaik pertama untuk kabupaten/kota di Jatim. Kabupaten Sidoarjo dinilai terbaik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional yang cemerlang, efektif, responsif, inovatif, dan akurat (Pelita Ceria) Tahun 2023.

Dinas Kesehatan Sidoarjo men-

data, hingga Januari 2024, Kabupaten Sidoarjo telah memiliki 351 kelompok asuhan mandiri. Semuanya tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Dari ruang lingkup kecil, seperti RT/RW, peran mereka terus dikembangkan ke lingkup lebuh luas.

Pelatihan ini memotivasi peserta untuk terus meningkatkan peran aktif dalam sosialisasi asuhan mandiri pemanfaatan toga dan akupresur. Kiprah mereka meningkat hingga ke satu desa, bahkan kecamatan.

Salah satu peserta yang mengikuti pelatihan Rabu(12/6/24) mengatakan ,dengan dukungan dan dorongan dari dr Sriatun Subandi, peserta terlihat begitu antusias mengikuti pelatihan. Materi pelatihan diperhatikan. Praktik-praktik langsung pengobatan tradisional juga diikuti dengan antusias.

Misalnya, praktik memijat teman sesama peserta. Narasumber membimbing peserta dengan baik. Keahlian itu minimal bisa bermanfaat untuk diterapkan kepada keluarga sendiri.

"Saya sangat senang diundang jadi peserta pelatihan ini. Alham-dulilah dapat ilmu membuat jamu dan memijat," ungkap salah seorang peserta dengan bersemangat. • Loe

CS Diprestal dengas Condicarrer

DUTA

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Bangun Sekolah Mandiri

sekolah sangat dibutuhkan di Kabupaten Sidoarjo. Mandiri dalam keuangan, mampu mengelola sumber daya pendidik, kurikulum hingga proses belajar mengajar.

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M. Kn berkomitmen untuk menciptakan sekolah mandiri. Dia mengajak para kepala sekolah memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan pendidikan yang lebih optimal.

"Kepala sekolah dan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kami berharap kepala sekolah dapat melakukan manajemen sekolahnya dengan sangat baik" kata Plt Bupati Subandi, saat acara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) KKKS-KKG se Kec. Sukodono di Gedung PGRI Sidoarjo.

Untuk menciptakan sekolah mandiri, stabilitas perekonomian guru juga harus dijaga. Plt Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan bakal memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Bisa untuk jaminan keselamatan saat bekerja dan juga tabungan setelah tidak lagi mengajar.

"Pemkab Sidoarjo akan hadir membantu melalui BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan ini akan menjadi garansi atau jaminan bagi para guru yang sudah berjasa dalam mendidik calon penerus bangsa" ucap Suabndi dihadapan 242 Guru Wali Kelas SD se Kec. Sukodono.

Sementara Pengawas Sekolah Dasar Korwil Sukodono, Sumiyatin mengungkapkan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini sangat penting bagi guru.

Ada 25 kepala sekolah dan ratusan guru yang ikut dalam PKB. Melalui program ini, diharapkan para pendidik atau guru bisa memahami dan memetakan sikap belajar anak didiknya.

"Kolaborasi antar pendidik dan Aksi Nyata atau praktik dalam proses belajar mengajar menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan acara ini" ucap Sumiyatin Rabu(12/6/24)

Kedepan, Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan yang sejalan dengan kurikulum merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Tujuannya agar pendidikan di Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas yang lebih baik lagi, siswa-siswi juga memiliki kemampuan dan prestasi yang dapat mengharumkan nama Sidoarjo. • Loe





LOETF/DUTA

Plt Bupati Subandi, saat acara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) KKKS-KKG se Kec. Sukodono di Gedung PGRI Sidoarjo







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Perkuat Intimacy Stakeholder, PLN Lakukan Audiensi dengan DPRD Sidoarjo

Redaksi Juni 12, 2024





PLN Lakukan Audiensi dengan DPRD Sidoarjo



SIDOARJO — PT. PLN (Persero) UP3 Sidoarjo melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo Rabu (12/06/2024) di Gedung DPRD Sidoarjo bertujuan untuk membahas berbagai hal terkait pelayanan PLN kepada masyarakat dan mensosialisasikan aplikasi PLN Mobile.

Audiensi ini dihadiri oleh MUP3 Sidoarjo beserta jajaran, Ketua DPRD Sidoarjo H.Usman dan Sekretaris Dewan Hari Sucahyono.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam kesempatan tersebut, PLN UP3
Sidoarjo menjelaskan berbagai kemudahan
yang didapatkan melalui aplikasi PLN
Mobile kepada anggota DPRD, seperti
pengaduan gangguan, pengecekan
tagihan Listrik dan pembayaran tagihan
Listrik secara lebih mudah dan cepat.

Selain itu, PLN juga mengajak kolaborasi dengan masyarakat untuk membayar tagihan listrik tepat waktu guna menjaga kelancaran pasokan Listrik dan berkelanjutan operasional PLN.



Ketua DPRD, H. Usman, M.Mkes
menyampaikan, "Kami sangat
mengapresiasi terhadap pelayanan PLN
yang sudah baik dan selalu selangkah lebih
maju. Hal ini menjadi Langkah positif dalam
meningkatkan integritas layanan publik. Ia
juga berharap kedepannya PLN terus
menjunjung transparansi atas informasi
yang disampaikan kepada masyarakat,"
Ungkapnya.

Sekretaris Dewan Hari Sucahyono SH. M. Si menambahkan, "Kami mendukung penuh inisiatif PLN untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile. Kemudahan yang ditawarkan diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka, termasuk membayar Listrik tepat waktu," ungkapnya.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MUP3 Sidoarjo, Feri Asmoro menyampaikan, "Kami berterimakasih atas dukungan yang diberikan dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat."tutupnya

Audiensi ini ditutup dengan foto bersama, kami berharap Kolaborasi ini dapat terus terjalin dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Sidoarjo.



DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Redaksi Juni 12, 2024









DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna pada hari Rabu (12/06/2024) untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi, OPD, dan seluruh anggota DPRD Sidoarjo.



Dalam rapat tersebut, Anang Ma'ruf, Juru Bicara Fraksi PKS, menyampaikan pandangannya terkait penurunan piutang daerah yang mencapai Rp 31 miliar dibandingkan tahun 2022, dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar.

Anang menjelaskan bahwa piutang terbesar berasal dari pajak daerah (PBB) yang stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti oleh piutang dari Badan Layanan Daerah (BLD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait langkah strategis yang akan diambil untuk mengurangi piutang daerah secara signifikan., Jelas Anang





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Plt Ketua TP PKK Sidoarjo dr Sriatun Subandi Apresiasi Pelatihan Pelayanan Kesehatan Tradisional oleh Dinkes Sidoarjo

June 12, 2024 - 20 Views





Sidoarjo – Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu di antara 25 upaya kesehatan di Indonesia. Di Sidoarjo pun, Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan sistem pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan
Pelatihan Pengelola Pelayanan
Kesehatan Tradisional di Kusuma Agro
Resort dan Convention Hall Kota Batu.
Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa
(11/6) dengan tema Asuhan Mandiri
Pemanfatan Toga dan Akupresur
Kabupaten Sidoarjo Th. 2024.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Plt Ketua Tim Penggerak PKK Kab.
Sidoarjo dr. Sriatun Subandi membuka
acara. Dia menyatakan sangat
mengapresiasi kegiatan yang benarbenar bermanfaat dan solutif bagi
kesehatan masyarakat itu. Peserta
pelatihan dibimbing agar mampu
melakukan perawatan kesehatan secara
mandiri (asuhan mandiri).

Mereka bisa memanfaatkan taman obat keluarga (Toga). Juga memiliki keterampilan memelihara dan meningkatkan status kesehatan. Serta, mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringain. Semua bisa dilakukan secara mandiri.



"Untuk mengembangkan kemampuan masyarakat melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional, pembinaan seperti ini perlu dilakukan berkesinambungan," jelas dr Sriatun.

Menurut istri Plt Bupati Sidoarjo H
Subandi itu, anggota kelompok keluarga
binaan akan mempunyai pengetahuan
dan keterampilan dalam memanfaatkan
Toga serta akupresur. Mereka akan
semakin terampil jika mengikuti
pembinaan berkelanjutan.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Kiprah Pemkab Sidoarjo itu berbuah prestasi. Pembinaan program pelayanan kesehatan tradisional dengan pemanfaatan taman obat keluarga (Toga) dan akupresur ini telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Sidoarjo memperoleh penghargaan terbaik pertama untuk kabupaten/kota di Jatim. Kabupaten Sidoarjo dinilai terbaik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional yang cemerlang, efektif, responsif, inovatif, dan akurat (Pelita Ceria) Tahun 2023.



Dinas Kesehatan Sidoarjo mendata, hingga Januari 2024, Kabupaten Sidoarjo telah memiliki 351 kelompok asuhan mandiri. Semuanya tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Dari ruang lingkup kecil, seperti RT/RW, peran mereka terus dikembangkan ke lingkup lebuh luas.

Pelatihan ini memotivasi peserta untuk terus meningkatkan peran aktif dalam sosialisasi asuhan mandiri pemanfaatan toga dan akupresur. Kiprah mereka meningkat hingga ke satu desa, bahkan kecamatan.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dengan dukungan dan dorongan dari dr Sriatun Subandi, peserta terlihat begitu antusias mengikuti pelatihan. Materi pelatihan diperhatikan. Praktik-praktik langsung pengobatan tradisional juga diikuti dengan antusias.

Misalnya, praktik memijat teman sesama peserta. Narasumber membimbing peserta dengan baik. Keahlian itu minimal bisa bermanfaat untuk diterapkan kepada keluarga sendiri.

"Saya sangat senang diundang jadi peserta pelatihan ini. Alhamdulilalh dapat ilmu membuat jamu dan memijat," ungkap salah seorang peserta dengan bersemangat. (GUS)



Kabar Gembira Bagi Masyarakat Sidoarjo, Pemkab Bebaskan Denda Pajak Sampai 27 September

NEWS 12 JUNI 2024 17 KALI DILIHAT







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO/SOROTMATA.COM – Pembangunan harus terus berjalan. Pemkab Sidoarjo bertekad melanjutkan program-program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastuktur. Agar hasilnya lebih baik lagi, dibutuhkan ketersediaan anggaran daerah. Salah satunya, pendapatan pajak.

Pemkab Sidoarjo menggencarkan lagi Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke desa-desa. Perolehan pajak daerah diupayakan lebih intensif lagi.

Bagi wajib pajak yang terkena sanksi denda, beban mereka diringankan. Dibebaskan dari denda. Pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak daerah itu diberlakukan mulai 1 Juni sampai 27 September 2024.



Plt Bupati Sidoarjo Subandi S.H. M.Kn ingin memastikan program-program terkait pajak daerah itu mengena dan dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi PBB-P2 berlangsung pada Rabu (12/6/2024) di Balai Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo.

"Pendapatan dari pajak pada hakikatnya kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang yang merasakan pembangunan berkat pajak yang dibayarnya. Nah, pembangunan Kabupaten Sidoarjo ini bergantung pendapatan pajak daerahnya," jelas Subandi.

Sosialisasi PBB-P2 ini diharapkan mampu mendorong intensifikasi pajak daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo meningkat optimal. Kesadaran masyarakat tumbuh. Semakin taat membayar pajak. Menjadi warga Sidoarjo yang berperan aktif dan nyata dalam membangun daerahnya.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

"Kita harapkan sosialisasi-sosialisasi PBB seperti dapat terus dilakukan agar masyarakat membayar pajak yang menjadi kewajibannya," ungkap Subandi.

Untuk program pembebasan sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak daerah, ada yang perlu dipahami. Pembebasan denda itu diberikan kepada wajib pajak/WP yang belum membayar pajak terutang sampai dengan masa pajak tahun pajak 2023 sampai April 2024. Jenis pajak tersebut meliputi PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tidak hanya denda keterlambatan PBB. Pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak juga diberikan pada pajak reklame, pajak air tanah, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

PBJT ini meliputi pajak makanan dan minuman, pajak tenaga listrik, pajak jasa perhotelan, pajak jasa parkir, pajak jasa kesenian dan hiburan. Ingat, pemutihan pajak berakhir sampai tanggal 27 September 2024. (*Nuri*)



Fraksi PKS Pertanyakan Piutang Pemkab Sidoarjo Senilai Rp300,5 miliar



Yunda Sundari - 13 Juni 2024



Deni Harianto, Ketua Fraksi PKS Sidoarjo saat menyampaikan pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (12/6/2024) (Yunda/GOnews.id)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan rapat paripurna II dengan agenda Pandangan Umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023. Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (12/6/2024).

Hadir dalam rapat ini ketua DPRD Usman, Plt Bupati Sidoarjo Subandi Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Forkopimda, kepala kesatuan TNI dan Polri, sekretaris daerah dan jajaran pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo.



Rapat dibuka oleh Usman yang menyampaikan bahwa pertemuan ini didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah DPRD pada 3 Juni 2024.
Rapat tersebut menindaklanjuti berita acara yang memutuskan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Dari 50 anggota dewan, 26 orang hadir dalam rapat ini.

Ketua Fraksi PKS Deni Harianto menyampaikan pandangan umum fraksi diawali oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo dan pimpinan rapat paripurna. Mereka menilai pentingnya pembahasan Raperda ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

"PKS mengapresiasi realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan mendorong peningkatan akuntabilitas serta perencanaan keuangan yang lebih akurat. Mereka juga menyoroti masalah piutang daerah yang mencapai Rp300,556 miliar pada tahun 2023, turun dari Rp311,663 miliar pada tahun 2022. Fraksi PKS meminta penjelasan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi piutang tersebut," ungkapanya



pendapatan asli daerah (PAD) yang sah jumlah terbesar merupakan piutang badan urusan legislasi daerah (BULD) RSUD, juga meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Kemudian piutang retribusi juga meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. fraksi PKS melihat besaran jumlah piutang daerah tersebut sebagai sebuah potensi untuk pembiayaan pembangunan daerah, maka dari itu sudah semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan penanganan terhadap permasalahan piutang tersebut. Sehingga kami meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menjelaskan kepada kami apa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upayanya mengurangi piutang daerah secara signifikan.

Kemudian jumlah terbesar kedua piutang lain





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

"Jumlah terbesar merupakan piutang di RSUD juga meningkat jumlahnya, dibanding tahun sebelumnya. Fraksi PKS melihat besaran jumlah piutang daerah tersebut sebagai sebuah potensi untuk pembiayaan pembangunan Daerah maka dari itu sudah sepertinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut. Sehingga kami meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menjelaskan kepada kami apa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upayanya mengurangi piutang daerah secara signifikan," terangnya.

Temuan BPK terkait belanja pegawai yang tidak sesuai ketentuan juga menjadi perhatian PKS. Mereka meminta penjelasan mengenai sistem pengawasan, kebijakan, dan SOP terkait, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut.



Fraksi PKS menekankan pentingnya konsistensi pelaporan antar dokumen publik untuk menunjukkan akuntabilitas. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan dan memastikan hal serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Bahwa adanya temuan BPK dalam belanja pegawai pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah kurang akuratnya prediksi belanja pegawai yang ingin mengakibatkan adanya bisa lebih belanja pegawai tahun 2023," terangnya.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Fraksi PKS mencermati kesamaan dan konsistensi pelaporan antar dokumen publik merupakan hal yang serius dan penting menunjukkan akuntabilitas publik dari hal yang dilaporkan serta kelayakan dokumen yang memadai atas adanya perbedaan pelaporan pada dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2023 tersebut.

"DPRD meminta penjelasan apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana upaya pemerintah daerah agar hal yang sama tidak terulang pada tahun yang akan datang," tandasnya.



Terbakar 2023 Lalu

Tiga Ruang Kelas SDN Jenggot Krembung Baru Diperbaiki Tahun

oarjo, Memo X
DN Jengot, Kecamatan Krem1g, Sidoarjo yang pada akhir
uun 2023 lalu mengalami keataran, bakai diperbakik. Akibat
sakaran nebat itu berdampak
ruang kelas mengalami kerkan cukup parah.
Pemkab Sidoarjo akan menykan anggaran untuk perbaiki
olah (SDN) jenggot) yang rusak
bat terjadinya kebakaran ini,"
r Plt Bupati Sidoarjo, Subandi
t Sidak di SDN Jenggot, Senin
(06/2024).

0/06/2024). Selain itu, Subandi mengin-ruksikan ke Kepala Dinas Pen-idikan dan Kebudayaan Pemk-b Sidoarjo, Dr Tirto Adi untuk gera memperbaiki ruangan DN Jenggot yang mengalami erusakan itu. Diantaranya be-

berapa ruang kelas dan kantor sekaligus ruang guru.

"Kami akan bekerja secepat mungkin untuk memperbaiki ba-ngunan yang rusak. Harapannya, agar memberikan kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar," kata Subandi. Subandi juga meminta agar bukan bangunannya saja yang diperbaiki. Akan tetapi, fasili-tas pendukungnya seperti meia,

diperbaiki. Akan tetapi, fasili-tas pendukungnya seperti meja, kursi, komputer dan alat tulis juga harus dilengkapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo. "Agar semua kebutuhan sarana dan prasaran untuk proses bela-jar mengajar terpenuhi semua," tegasnya. Sementara Kepala SDN Jenggot, Maftuchanis Chariro mengung-



SIDAK - Plt Bupati Sidoarjo, Subandi saat Sidak di SDN Jenggot, Kecamatan Krembung yang dua ruang kelas dan satu ruang guru terbakar pada akhir Tahun 2023 lalu yang belum diperbaiki hingga saat ini, Senin (10/06/2024).

agar anak-anak tetap bisa belajar meskipun dalam situasi darurat. "Kami menllai sistem masuk shift yang telah dilakukan ini memang kurang efektif. Tapi hanya dengan cara itu anak-anak didik bisa belajar semua. Kami berharap perbaikan bangunan sekolah dapat segera terselesaikan dalam waktu singkat agar anak-anak dapat kembali belajar dengan normal," tandasnya. (par/wan)